



Jasiora : Vol 2 No 2 Juni 2017

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)



Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian (Studi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo)

Nova Elyra¹, Dedi Epriadi², Widya Pratiwi³ Tomi Hendra⁴

¹STIA Setih Setio Muara Bungo

²STIA Setih Setio Muara Bungo

³STIA Setih Setio Muara Bungo

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

Masuk: 23 Maret 2017

Diterima: 29 Mei 2017

Terbit: 15 Juni 2017

Keywords:

Analysis, Management, Raw
Materials, Production

Abstract

This research To find out the obstacles faced by the Bungo Regency Personnel and Training Agency in the application of staffing information systems in order to improve the discipline of staffing administration; To find out the efforts made by the Bungo Regency Personnel and Training Agency in overcoming the obstacles mentioned above. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, while the population in this study is the Head and Staff of the Bungo Regency Civil Service and Training Staff, and the Bungo Regency Civil Servants. And the number of research samples studied as many as 10 people, determined by purposive sampling technique. From the research results it is known that the effectiveness of the implementation of the personnel information system in improving the orderly administration of staffing at the Bungo Regency Personnel and Training Agency has run according to its standards, but is still not optimal; Constraints faced by the Bungo Regency Personnel and Training Agency in the application of staffing information systems to improve staffing administration: Lack of operator personnel needed to manage the SIMPEG; The staffing data that enter the Bungo Regency BKD Personnel Management Information System is still inaccurate; The Simpeg application is still used inflexible meaning the Simpeg application from the Ministry of Home Affairs still needs to be updated, so that it requires additional costs for updating; The efforts made by the Bungo Regency Personnel and Training Agency in overcoming the obstacles faced are: Proposing an increase in operator staff to manage SIMPEG; Improve the accuracy of the performance of the operator and remind the staff of the Regency Government. Bungo on his staffing data; Submitting costs to renew Simpeg, so that performance is more leverage

Abstrak

Kata kunci:
Analisis, Manajemen, Bahan
Baku, Produksi

Corresponding Author:
Nova Elsyra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo; Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian; Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi kendala tersebut diatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bungo. Dan jumlah sampel penelitian yang diteliti sebanyak 10 orang, yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo sudah berjalan sesuai standarnya, namun masih belum optimal; Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian: Kurangnya tenaga operator yang diperlukan untuk mengelola SIMPEG tersebut; Data kepegawaian yang masuk ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian BKD Kabupaten Bungo masih belum akurat; Aplikasi Simpeg masih digunakan tidak fleksibel artinya Aplikasi Simpeg dari Kemendagri masih perlu diperbaharui, sehingga membutuhkan biaya tambahan setiap mengupdate; Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah: Mengajukan penambahan tenaga operator untuk mengelola SIMPEG; Meningkatkan keakuratan kinerja dari tenaga operator dan mengingatkan kembali kepada pegawai Pemkab. Bungo terhadap data kepegawaiannya; Mengajukan biaya untuk memperbaharui Simpeg, biar kerjanya lebih maksimal

1. Pendahuluan

Jumlah pegawai negeri yang begitu besar serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang profesional yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, merupakan suatu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Tantangan tersebut akan terasa lebih mudah dengan dimanfaatkannya teknologi informasi sebagai solusi dan alat bantu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut adalah pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

SIMPEG adalah sistem Informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Pembuatan SIMPEG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan informasi tentang keadaan data pegawai terkini, baik di tingkat Pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga data pegawai yang ada akan memberikan manfaat bagi pegawai yang bersangkutan dan pihak lain yang membutuhkan, serta kebutuhan Organisasi khususnya. Fungsi utama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yaitu membantu memberikan data/informasi secara

cepat, tepat dan akurat untuk bahan analisa pimpinan dalam pengambilan keputusan, karena SIMPEG ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 dimana terdiri dari: modul Data Induk Pegawai, modul Data Pelatihan, modul Promosi Jabatan, modul Tanda Jasa, modul Data Mutasi, modul Data Cuti, modul Data Hukuman, modul Laporan¹

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan diklat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo mempunyai fungsi sebagai berikut:² Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan diklat, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat dan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Menurut pengamatan awal peneliti terhadap pemanfaatan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo telah berjalan seperti prosedur yang telah ditentukan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti: Sebagian data kepegawaian yang masuk ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih belum akurat, Aplikasi SIMPEG tersebut digunakan tidak fleksibel artinya Aplikasi SIMPEG dari Kemendagri masih perlu diperbaharui, sehingga membutuhkan biaya tambahan setiap mengupdate, Kurangnya tenaga operator yang diperlukan untuk mengelola SIMPEG tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo?, Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian?, Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi kendala tersebut di atas?

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bungo. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Purposive Sampling* (Sampel bertujuan). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari: Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Kasubbag Diklat, Kasubbag Status Kepegawaian & Pensiun, Subbagian Program, Kasubbag. Perencanaan Pegawai, Ka. Bidang

¹Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, tentang *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*.

²Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2008 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo*.

³Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, Hal. 16.

Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, 3 (tiga) orang staf pegawai Badan Kepegawaian Daerah. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni data primer, dan data sekunder. Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap, maka langkah selanjutnya yang sangat penting untuk dilakukan adalah menganalisa data. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka proses analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian.

Sistem Informasi Kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo pada hakikatnya adalah sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo Dimana saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo sudah mencapai 6.397 orang (Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Januari 2015) sedangkan jumlah pegawai BKD sebagai pengelola data PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo hanya berjumlah 49 orang. Untuk menghasilkan informasi kepegawaian guna menjadi acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen kepegawaian, BKD menjalankan sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG). Gambaran implementasi SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo ini akan tampak lebih jelas apabila ditelusuri sejak awal pembangunan pertama sistem informasi.

Adapun komponen atau kegiatan utama dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yaitu terdiri atas *input*, proses dan *output*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yurnalion, selaku Kasubbag. Program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo.

“...Prosedur kerja SIMPEG terdiri dari tiga kegiatan yaitu input, proses dan output. Dimana input merupakan data-data kepegawaian yang kemudian diproses sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, informasi itu kemudian dapat pula dijadikan kembali sebagai data kepegawaian”.⁵

Kemudian Yurnalion menambahkan, “Manfaat dari SIMPEG sangat banyak manfaatnya antara lain: lebih mudah diketahui informasi data pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintah Kabupaten Bungo, Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai dengan cepat, mulai penempatan awal pegawai tersebut sekaligus mengetahui pegawai mana yang sudah ikut diklat apa-apa saja jenis diklatnya, pokoknya banyak lah manfaatnya intinya yah memudahkan kita untuk mengolah data kepegawaian. Yang pastinya kami berikan informasi sesuai dengan kebutuhan”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama M. Yusuf selaku Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bungo, “Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Ulang Pendataan Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015, untuk pendataan ulang kepegawaian lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sudah pernah kita lakukan pada tahun 2013, namun berdasarkan pelaksanaan Undang-undang dan

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 8

⁵Hasil Wawancara dengan Yurnalion, Kasubbag. Program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 05 Oktober 2016.

⁶Hasil Wawancara dengan Yurnalion, Kasubbag. Program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 05 Oktober 2016.

Peraturan Kepala BKN tersebut, pegawai negeri sipil Kabupaten Bungo telah melakukan pendataan ulang sebanyak kurang lebih 5.000 orang dari 6.397 orang pegawai yang ada”.⁷

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, maka kita melihat akan 3 (tiga) tujuan utama atau manfaat penerapan sistem informasi kepegawaian itu sendiri, di antaranya:

a. Analisis Perencanaan Pegawai dan Penempatan Pegawai sebagai informasi data input SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo.

Analisis perencanaan dan penempatan pegawai sangat penting dilakukan, karena perencanaan pegawai yang baik akan memperbaiki pemanfaatan pegawai, menyesuaikan aktivitas pegawai dan kebutuhan pegawai di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam merekrut pegawai baru serta melengkapi informasi tentang kepegawaian yang dapat membantu kegiatan kepegawaian dan unit instansi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hasna selaku Kabid. Perencanaan & Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, “Melalui perencanaan dapat kita ketahui kekurangan dan kelebihan pegawai negeri sipil yang kita miliki dan kita butuhkan saat ini, sehingga di saat membutuhkan penambahan pegawai tersebut, kita dapat melakukan pengajuan kebutuhan pegawai ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, setelah diajukan dan disetujui untuk melakukan perekrutan, promosi pegawai, dan transfer pegawai secara proaktif sehingga tidak mengganggu kegiatan instansi pemerintah Kabupaten Bungo lainnya”.⁸

Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Buhari selaku Kasubbag. Perencanaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, “Untuk melakukan penambahan pegawai, kita akan melihat statistik pegawai di Pemerintah Kabupaten Bungo, kita akan melihat riwayat tenaga kerja mulai dari usia pegawai dalam satu unit, pendidikan pegawai, ketersediaan pegawai dalam satu satuan unit kerja instansi Pemerintah Kabupaten Bungo”⁹ Kemudian Ahmad Buhari menambahkan, “Untuk saat ini yang paling banyak dibutuhkan untuk mengisi kekurangan setiap unit instansi adalah tenaga guru dan tenaga medis”¹⁰

Selain memberikan informasi tentang ketersediaan jumlah pegawai yang dimiliki dan yang dibutuhkan, Aplikasi SIMPEG juga bermanfaat untuk memberikan informasi alur perpindahan dan penempatan pegawai dalam satu periode. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama Ibu Natalia Puji TR selaku salah satu Staf Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, “Secara umum Aplikasi SIMPEG ini dibuat bertujuan untuk menyesuaikan antara pegawai yang dibutuhkan dengan pekerjaan yang tersedia. Contohnya seperti Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang membutuhkan Sarjana Pertanian untuk membina petani karet maupun petani sawit, maka kita bisa merekrut pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau sejenisnya”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama Vivin Anugrah selaku salah satu Staf Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, “fungsi SIMPEG lainnya adalah memberikan penilaian kinerja dalam menunjang penempatan pegawai berdasarkan

⁷Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 7 Oktober 2016.

⁸Hasil Wawancara dengan Hasnah, selaku Kabid. Perencanaan & Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 20 Oktober 2016.

⁹Hasil Wawancara dengan Ahmad selaku Buhari, Kasubbag. Perencanaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 20 Oktober 2016.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Ahmad Buhari, selaku Kasubbag. Perencanaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 20 Oktober 2016.

¹¹Hasil Wawancara dengan Natalia Puji TR selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 29 Oktober 2016.

data umum yang dimiliki oleh pegawai, misalnya dilihat dari segi pendidikan, ketika ada jabatan yang kosong, maka Subbagian Perencanaan Pengadaan memanfaatkan SIMPEG dalam menentukan pegawai yang akan menduduki jabatan yang kosong tersebut setelah pegawai tersebut telah memenuhi semua kualifikasi yang telah ditetapkan”¹²

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat memberikan informasi dan membantu BKD dalam mengambil keputusan di bidang perencanaan dan penempatan pegawai sesuai dengan instansi yang membutuhkan.

b. Analisis pengembangan pegawai (Diklat), sebagai informasi data proses SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Pengembangan dan pelatihan manajemen sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, merupakan salah satu untuk mewujudkan professional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ma'ruf selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, "...orientasi pengembangan dan pelatihan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mewujudkan professional pegawai yang mengutamakan, tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan analisa pekerjaan, artinya analisa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan akan kebutuhan aparatur, sehingga Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dapat merencanakan kebutuhan aparatur berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggung jawab terhadap satuan unit kerja yang ada”¹³

Kemudian Ma'ruf menambah, “dengan adanya SIMPEG ini, kita bisa mengevaluasi kemampuan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo, jika kinerjanya menurun dan dibawah standar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, maka pegawai tersebut wajib mengikuti Diklat yang telah ditetapkan waktu dan tempat. Namun kalau kinerjanya meningkat atau pegawai tersebut berprestasi, kita akan mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Bungo untuk memberikan bantuan beasiswa untuk meningkatkan jenjang pendidikan pegawai tersebut”¹⁴

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai baik pegawai yang berprestasi maupun pegawai yang kurang berprestasi.

c. Analisis Manajemen pegawai sebagai informasi data output untuk Aplikasi SIMPEG Pemerintah Kabupaten Bungo.

Selain untuk mengevaluasi pengembangan dan pelatihan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Bungo, pemanfaatan Aplikasi SIMPEG yakni sebagai manajemen pegawai seperti: evaluasi kinerja kerja harian pegawai, produktivitas, kehadiran, dan disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sungging Prabowo selaku salah satu Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, "...pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dasar penilaian yang dipakai oleh Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih menggunakan DP3 (Daftar Penilaian

¹²Hasil Wawancara dengan Vivin Anugrah selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 29 Oktober 2016.

¹³Hasil Wawancara dengan Ma'ruf, selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 26 Oktober 2016.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ma'ruf, selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 26 Oktober 2016.

Pelaksanaan Pekerjaan) dan turunan dari *balance scorecard*, untuk saat ini belum ada Aplikasi SIMPEG untuk penilaian kinerja secara langsung, jadi saat ini penilaian kerja masih menggunakan berkas fisik, namun untuk pengembangan berikutnya akan dirancang aplikasi untuk penilaian kinerja pegawai”.¹⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna Sari Dewi selaku Kasubbag. Pembinaan Pegawai, "...Penilaian kinerja dengan menggunakan berkas fisik memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan modul Aplikasi SIMPEG, hal ini dikarenakan pegawai yang ada pada biro kepegawaian harus menilik satu persatu berka yang berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai yang selanjutnya akan dinilai. Namun jika dalam Aplikasi SIMPEG sudah mencakup dalam penilaian pegawai, maka si pemakai SIMPEG akan lebih mudah dalam menilai pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang selanjutnya akan disimpan dan diakumulasikan secara bertahap”.¹⁶

Di dalam Aplikasi SIMPEG juga menyediakan menu *Time and Attendance* yang digunakan untuk memonitoring kehadiran pegawai. Berdasarkan hasil wawancara Unita Triyana selaku Kasubbag. Status Kepegawaian & Pensiun, "...untuk penilaian kehadiran pegawai yang dipakai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dan instansi Pemerintah Kabupaten Bungo lainnya sudah menggunakan sistem *fingerprnt*, namun sistem *fingerprnt* ini belum terkoneksi langsung dengan Aplikasi SIMPEG, hal ini dikarenakan belum adanya menu aplikasi khusus yang terkait dengan absensi/kehadiran. Hasil dari absen secara sistem *fingerprnt* ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu penilaian disiplin pegawai tiap bulannya”.¹⁷

Hal ini sependapat dengan hasil wawancara bersama M. Yusuf, “Aplikasi-aplikasi tersebut seharusnya sudah ada pada sebuah instansi pemerintahan. Karena saya menilai aplikasi-aplikasi tersebut kan dapat meringankan pekerjaan manajemen pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, dengan adanya aplikasi absensi dan penilaian kinerja secara integrasi setiap instansi, kita bisa tahu dengan mudah mana pegawai yang disiplin dan pegawai tidak disiplin”.¹⁸

Berdasarkan keterangan yang telah peneliti paparkan dan didukung oleh kutipan wawancara dengan informan yang berkompeten menjawab pertanyaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa Aplikasi SIMPEG dapat membantu Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam memajemen pegawai.

3.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.

Setelah melihat pemanfaatan dari penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, maka peneliti akan menjabarkan hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan Aplikasi SIMPEG tersebut, di antaranya:

a. Kurangnya tenaga operator yang diperlukan untuk mengelola SIMPEG tersebut.

Salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan Aplikasi SIMPEG tersebut adalah sumber daya manusia dibidang operator. Hal ini dikarenakan data-data yang akan dimasukkan kedalam

¹⁵Hasil Wawancara dengan Sungging Prabowo selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ratna Sari Dewi selaku Kasubbag. Pembinaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 26 Oktober 2016.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Unita Triyana selaku Kasubbag. Status Kepegawaian & Pensiun di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 03 November 2016.

¹⁸Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 7 Oktober 2016.

SIMPEG masih banyak dilakukan secara manual dan belum secara terintegrasi (terkoneksi jaringan internet) antara instansi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dengan instansi Pemerintah Kabupaten Bungo lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ahmad Buhari, "...Saat ini jumlah PNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo berjumlah 49 Orang, sedangkan PNS yang bertugas sebagai tenaga operator berjumlah 1 Orang, sedangkan jumlah PNS yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Bungo sebanyak 6.397 orang seperti yang anda ketahui"¹⁹. Kemudian Ahmad Buhari menambahkan, "...menurut saya idealnya jumlah tenaga operator Aplikasi SIMPEG ini adalah 4-5 orang untuk menangani data kepegawaian sebanyak 6.397 orang"²⁰.

Hal ini dibenarkan oleh M. Yusuf, "...untuk saat ini yang bertugas di bidang Pranata Komputer ada 3 orang, namun yang bertanggungjawab dibidang operator SIMPEG di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo berjumlah 1 orang"²¹.

Dengan kondisi yang dipaparkan secepat tersebut, menyebabkan kinerja tertib administrasi kepegawaian belum optimal, sehingga sangat diperlukan adanya penambahan tenaga operator di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo.

b. Data kepegawaian yang masuk ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih belum akurat.

Keakuratan menjadikan tolak ukur keberhasilan dalam sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian, semakin tinggi tingkat keakuratannya, maka data tersebut bisa diandalkan dan bisa dipakai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ma'ruf, "...untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Bungo memantau kinerja pegawai baik segi umur pegawai, jenjang pendidikan pegawai, golongan jabatan, masa kerja, pengalaman kerja dan bidang keahlian. Namun setelah dilakukan pendataan ulang secara Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun lalu, data yang masuk kedalam Aplikasi SIMPEG masih belum 100% dan belum bisa dikatakan akurat"²².

Kemudian Ma'ruf menambahkan, "...Pegawai PNS yang mengikuti diklat setelah kita cek ternyata masih sedikit, kami tidak mengetahui kesalahannya dimana, apakah pegawai PNS Kabupaten Bungo yang kurang mengikuti Diklat, atau data informasi yang dimasukkan oleh Pegawai PNS tahun kemarin masih belum optimal, syarat untuk memasukkan data ke dalam Aplikasi SIMPEG harus didukung dengan data dalam bentuk fisik, mereka harus menscan piagam yang didapatkan pada saat mereka mengikuti Diklat tersebut"²³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diidentifikasi bahwa salah satu hambatan guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo adalah: data kepegawaian yang masuk kedalam Aplikasi SIMPEG masuk belum akurat.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Ahmad selaku Buhari, Kasubbag. Perencanaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 20 Oktober 2016.

²⁰Hasil Wawancara dengan Ahmad selaku Buhari, Kasubbag. Perencanaan Pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 20 Oktober 2016.

²¹Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 7 Oktober 2016.

²²Hasil Wawancara dengan Ma'ruf, selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 26 Oktober 2016.

²³Hasil Wawancara dengan Ma'ruf, selaku Kasubbag. Diklat pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 26 Oktober 2016.

c. Aplikasi SIMPEG masih digunakan tidak fleksibel artinya Aplikasi SIMPEG dari Kemendagri masih perlu diperbaharui, sehingga membutuhkan biaya tambahan setiap mengupdate.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian bukan hanya meningkatkan sumberdaya manusianya saja, tetapi juga didukung dengan peningkatan perangkat komputernya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sungging Prabowo, “perangkat keras atau unit komputer yang digunakan masih memiliki kekurangan, karena masih sering terjadi keterlambatan dalam proses penggunaan computer, keterlambatan kerja komputer dalam prose situ dikarenakan unit komputer terbatas atau perlu dilakukan di update lagi.”²⁴

Hal ini juga dibenarkan oleh Natalia Puji TR, “Untuk kelengkapan komputer seperti *keyboard, mouse, monitor*, printer, dan lain-lain sudah lengkap dan baik, tapi untuk kualitas isi dalam komputernya perlu ditambah, mulai penambahan kapasitas *hardisk* untuk media penyimpanan, penambahan *Memori* guna menambah kecepatan proses komputer itu sendiri”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Yurnalion, “...Untuk kualitas Aplikasi SIMPEG yang dimiliki BKD Kabupaten sudah baik, namun masih belum optimal, hal dikarenakan ada beberapa menu aplikasi belum tersedia dan aplikasi SIMPEG ini belum terintegrasi atau saling terhubung dengan SIMPEG instansi Pemerintah Kabupaten Bungo lainnya, jadi sangat diperlukan penambahan menu aplikasi baru untuk bisa membuat aplikasi SIMPEG Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo bisa terhubung dengan aplikasi SIMPEG instansi lainnya”.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, bahwa aplikasi SIMPEG masih belum optimal, dan perlu dilakukan penambahan atau pengupdatetan.

3.3 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi sehubungan dengan penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambata sehubungan dengan penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian diantaranya adalah:

a. Mengajukan penambahan tenaga operator untuk mengelola SIMPEG

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamidah selaku Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, “...untuk melakukan pengajuan penambahan PNS dibidang operator SIMPEG itu tergantung dari pemerintah pusat, hal ini tentunya bertujuan untuk mendukung kinerja operator SIMPEG supaya lebih maksimal”.²⁷

Hal ini sependapat oleh Bapak M. Yusuf, ”...kita menerima saran dan masukan dari penelitian saudara demi meningkatkan tertib pengadministrasian administrasi kepegawaian”.²⁸

²⁴Hasil Wawancara dengan Sungging Prabowo selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016.

²⁵Hasil Wawancara dengan Natalia Puji TR selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 29 Oktober 2016.

²⁶Hasil Wawancara dengan Yurnalion, Kasubbag. Program pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 05 Oktober 2016.

²⁷Hasil Wawancara dengan Hamidah, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016.

²⁸Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 7 Oktober 2016.

b. Meningkatkan keakuratan kinerja dari tenaga operator dan mengingatkan kembali kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap data kepegawaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sungging Prabowo, "...kita telah menghimbau pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang belum memasukkan data kepegawaiannya ke dalam Aplikasi SIMPEG yang telah kami sedia, dan kami akan meminta mereka mengecek kembali apa yang telah mereka masukkan, apakah sudah benar-benar lengkap atau belum".²⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh Hamidah, "Kita mengetahui siapa saja yang belum melengkapi data-datanya di aplikasi SIMPEG kita, jadi kita bisa memberi tahu kepada pegawai tersebut lewat instansi mereka masing-masing, hal ini sangat penting dilakukan karena ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap PNS".³⁰

c. Mengajukan biaya untuk memperbaharui SIMPEG.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamidah, "...kita sudah mengajukan biaya untuk perawatan dan penambahan perangkat komputer yang perlu diganti atau ditambah, agar kinerja dibagian operator bisa lebih maksimal".³¹

Kemudian M. Yusuf menambahkan, "...Iya kita memang perlu dilakukan penambahan perangkat komputer yang kinerja kurang baik, tapi hal ini harus disesuaikan dengan anggaran dana yang kita miliki, kalau tidak bisa diajukan penambahan sekarang, mungkin kita akan menganggarkan penambahan dana tersebut di anggaran tahun depan".³²

d. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sistem informasi kepegawaian dalam meningkatkan tertib administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo sudah berjalan sesuai standarnya, namun masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang belum mengentrikan data-data kepegawaiannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, diantaranya:
 - a. Kurangnya tenaga operator yang diperlukan untuk mengelola SIMPEG tersebut;
 - b. Data kepegawaian yang masuk ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih belum akurat;
 - c. Aplikasi SIMPEG masih digunakan tidak fleksibel artinya Aplikasi SIMPEG dari Kemendagri masih perlu diperbaharui, sehingga membutuhkan biaya tambahan setiap mengupdate;
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi sehubungan dengan penerapan sistem informasi kepegawaian guna meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, diantaranya:
 - a. Mengajukan penambahan tenaga operator untuk mengelola SIMPEG
 - b. Meningkatkan keakuratan kinerja dari tenaga operator dan mengingatkan kembali kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap data kepegawaiannya.
 - c. Mengajukan biaya untuk memperbaharui SIMPEG, biar kerjanya lebih maksimal.

²⁹Hasil Wawancara dengan Sungging Prabowo selaku Staf Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016

³⁰Hasil Wawancara dengan Hamidah, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016.

³¹Hasil Wawancara dengan Hamidah, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 10 November 2016.

³²Hasil Wawancara dengan M. Yusuf, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, Tanggal 7 Oktober 2016.

Saran

1. Meningkatkan kinerja dari aplikasi SIMPEG di setiap instansi Pemerintah Kabupaten Bungo, agar pegawai-pegawai bisa mengupdate data kepegawaiannya melalui instansi pegawai tersebut bekerja.
2. Mengingatkan kembali pegawai yang belum atau telah mengentrikan data-data kepegawaiannya, dan tentukan batas akhir pengentrian data kepegawaian, jika telat melakukan pengentrian maka beri sanksi kepada pegawai tersebut.
3. Mengajukan biaya perawatan dan pengelolaan SIMPEG secara rutin tiap tahunnya, agar kinerja aplikasi SIMPEG lebih optimal.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2005). *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
Suharsimi Arikunto, (2003). *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta.
Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, tentang *Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*.
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2008 tentang *Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bungo*.